

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN SOSIAL  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
(Studi Kasus Penerima PKH di Desa Duwet Kecamatan Bojong  
Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

**INDI AINI SHIKHA**

**NIM. 4318118**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN SOSIAL  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
(Studi Kasus Penerima PKH di Desa Duwet Kecamatan Bojong  
Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

**INDI AINI SHIKHA**

**NIM. 4318118**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indi Aini Shikha

NIM : 4318118

Judul Skripsi : **Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Penerima PKH di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Indi Aini Shikha

## NOTA PEMBIMBING

**Wahid Wachyu Adi Winarto, M.Si.**

Desa Temuireng RT. 16 RW.06 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Indi Aini Shikha

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

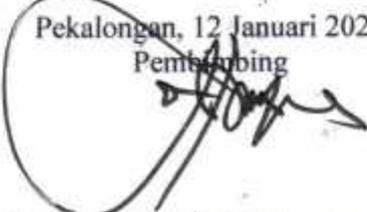
Nama : Indi Aini Shikha

NIM : 4318118

Judul Skripsi : **Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Penerima PKH di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 12 Januari 2023  
Pembimbing  


**Wahid Wachyu Adi Winarto, M.Si.**

**NIP. 19841031 201908 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
[www.febi.uingusdur.ac.id](http://www.febi.uingusdur.ac.id) email: [febi@uingusdur.ac.id](mailto:febi@uingusdur.ac.id)

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : **Indi Aini Shikha**

NIM : **4318118**

Judul : **Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Penerima PKH di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Rabu, 1 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji,

Penguji I

  
**Ade Gunawan, M.M.**  
NIP. 19810425 201503 1 002

Penguji II

  
**Ina Mutmainnah, M.Ak.**  
NIP. 19920331 201903 2 007

Pekalongan, 13 Maret 2023

Disahkan oleh Dekan,



  
**Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H.**  
NIP. 19750220 199903 2 001

## **MOTTO**

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”*

(Q.S Al-Insyirah: 5-8)

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun nonmateril dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisa Skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta saya Bapak Basuki Rohman dan Ibu Casrini yang selalu mendoakan, mendukung, menyayangi, dan memberi nasihat untuk setiap langkah perjalanan hidup yang saya lalui.
2. Untuk adik saya tersayang Liza Lu'atin Niswa dan keluarga besar yang selalu memberi semangat kepada saya.
3. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Bapak Wahid Wachyu Adi Winarto, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang sangat sabar dan baik yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Rosyid, S.E., M.Si., Ak.CA. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang selalu memberikan arahan dari awal masuk perkuliahan sampai selesainya perkuliahan.
6. Untuk sahabat saya dari awal masuk perkuliahan yaitu Umi Khafifah Finayanti dan Putri Damar Pangestika, serta sahabat saya dari masa SMA yaitu Astri Mundiyani, Nahdiyatul Haqi, Putri Isnayanti, dan Lailatul Munasifah yang selalu mendukung dan membantu saya.
7. Serta semua pihak yang mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu, terima kasih banyak.
8. *Last but not least, I want to thank myself. Thanks for the hard work. Thank you for not giving up easily. Thank you for trying to do your best. Thank you for solving all this. You are great.*

## ABSTRAK

### **INDI AINI SHIKHA. Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Penerima PKH di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)**

Pemerintah sekarang ini memiliki program kesejahteraan masyarakat. Salah satu programnya adalah pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Berbagai permasalahan yang timbul terkait dengan tata kelola sehingga banyak aduan dari masyarakat. Peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut terkait akuntabilitas dan transparansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan *case studies*. Sumber data primer pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara oleh 7 informan dan observasi mengenai kegiatan PKH. Sumber data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari laporan dan dokumen pendukung tentang PKH. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Metode analisis dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penyelenggaraan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Duwet sudah dilaksanakan secara akuntabilitas dan transparansi. Hal itu bisa dilihat dari penyelenggaraan PKH yang sudah berjalan sesuai dengan peraturan hukum pemerintah dan buku pedoman pelaksanaan PKH Tahun 2021-2024.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Program Keluarga Harapan (PKH)

## ABSTRACT

**INDI AINI SHIKHA. Accountability and Transparency in the Implementation of Social Assistance Funds for Program Keluarga Harapan (PKH) (Case Study of PKH Recipients in Duwet Village, Bojong District, Pekalongan Regency).**

The government now has a social welfare program. One of the programs is the provision of social assistance from Program Keluarga Harapan (PKH). Various problems that arise related to governance so that there are many complaints from the public. Researchers are interested in further studying accountability and transparency. The purpose of this study is to explain the accountability and transparency of the implementation of social assistance funds for Program Keluarga Harapan (PKH) in Duwet Village, Bojong District, Pekalongan Regency.

This research uses a qualitative method with a case studies approach. Primary data sources in this study were obtained from interviews by 7 informants and observations regarding PKH activities. Secondary data sources in this study were obtained from reports and supporting documents about PKH. Data validity was carried out by triangulation. The method of analysis in this study is data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions/data verification.

The results of this study reveal that the implementation of the Duwet Village Program Keluarga Harapan (PKH) assistance fund has been carried out with accountability and transparency. This can be seen from the implementation of PKH which has been running in accordance with government legal regulations and the PKH implementation guidebook for 2021-2024.

**Keywords:** Accountability, Transparency, Program Keluarga Harapan (PKH)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Tamamudin, S.E, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ria Anisatus Sholihah, S.E., M.S.A. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Wahid Wachyu Adi Winarto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang sangat sabar dan baik yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
7. Ahmad Rosyid, S.E., M.Si., Ak.CA. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang selalu memberikan arahan dari awal masuk perkuliahan sampai selesainya perkuliahan.
8. Seluruh dosen dan karyawan UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah bermanfaat memberikan ilmu dan membantu penulis selama melakukan studi.
9. Bapak Taufik selaku Sekretaris Desa Duwet dan Bapak Birin selaku Tenaga Administrasi Desa Duwet. Serta Ibu Herli, Ibu Daumi, Ibu Robikhati, Ibu Efi

Suminta, dan Ibu Slamet Rahayu yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan.

10. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral.
11. Teman-teman Jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2018 yang telah menjadi partner seperjuangan dimasa kuliah.
12. Untuk sahabat saya dari awal masuk perkuliahan yaitu Umi Khafifah Finayanti dan Putri Damar Pangestika, serta sahabat saya dari masa SMA yaitu Astri Mundiyani, Nahdiyatul Haqi, Putri Isnayanti, dan Lailatul Munasifah yang selalu mendukung dan membantu saya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 12 Januari 2023



**INDRI AINI SHIKHA**  
**NIM. 4318118**

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>JUDUL</b> .....                                | i    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</b> .....      | ii   |
| <b>NOTA PEMBIMBING</b> .....                      | iii  |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                           | iv   |
| <b>MOTTO</b> .....                                | v    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                          | vi   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                              | viii |
| <b>ABSTRACT</b> .....                             | ix   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                       | x    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                           | xii  |
| <b>TRANSLITERASI</b> .....                        | xiv  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                         | xx   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                        | xxi  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                      | xxii |
| <br>  |      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                    | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                   | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                          | 8    |
| C. Tujuan Penelitian .....                        | 9    |
| D. Manfaat Penelitian .....                       | 9    |
| E. Sistematika Pembahasan .....                   | 10   |
| <br>  |      |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....                | 12   |
| A. Landasan Teori .....                           | 12   |
| 1. Teori Fenomenologi Maurice Merleau-Ponty ..... | 12   |
| 2. Akuntansi Sektor Publik .....                  | 19   |
| 3. Akuntabilitas .....                            | 20   |
| 4. Transparansi .....                             | 25   |
| 5. Program Keluarga Harapan (PKH) .....           | 28   |
| B. Telaah Pustaka .....                           | 38   |
| C. Kerangka Berpikir .....                        | 45   |
| <br>  |      |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....            | 46   |
| A. Jenis Penelitian .....                         | 46   |
| B. Pendekatan Penelitian .....                    | 46   |
| C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....              | 47   |
| D. Subjek Penelitian .....                        | 47   |
| E. Sumber Data .....                              | 47   |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....                  | 48   |
| G. Teknik Keabsahan Data .....                    | 49   |
| H. Metode Analisis Data .....                     | 50   |

|  |     |
|--|-----|
| <b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b> ..... | 52  |
| A. Gambaran Umum Penelitian .....                | 52  |
| B. Temuan Penelitian .....                       | 53  |
| C. Pembahasan .....                              | 90  |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                       | 97  |
| A. Simpulan.....                                 | 97  |
| B. Keterbatasan Penelitian .....                 | 98  |
| C. Implikasi .....                               | 99  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                      | 100 |

## **DAFTAR TABEL**

|           |                                    |    |
|-----------|------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Rekap Data Penerima PKH Desa Duwet | 7  |
| Tabel 2.1 | Penelitian Terdahulu               | 38 |
| Tabel 4.1 | Data Informan Penelitian           | 54 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|            |                                   |    |
|------------|-----------------------------------|----|
| Gambar 1.1 | Grafik Data PKH Tahun 2007 – 2009 | 7  |
| Gambar 2.1 | Kerangka Berpikir                 | 45 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |        |
|---|--------|
| Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian             | I      |
| Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian            | II     |
| Lampiran 3 Panduan Wawancara                      | III    |
| Lampiran 4 Transkrip Wawancara                    | VI     |
| Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara                  | XXX    |
| Lampiran 6 KKS Penerima PKH                       | XXXIII |
| Lampiran 7 Surat Pemberitahuan Pencairan Dana PKH | XXXIV  |
| Lampiran 8 Bukti Kartu Pelajar dan KIA            | XXXV   |
| Lampiran 9 Dokumen Pedoman Pelaksanaan PKH        | XXXVI  |
| Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup                  | XXXVII |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu problem yang sering muncul dan berhubungan dengan tidak terjangkaunya kehidupan sosial, psikologis, ekonomi, dan politik. Dampak yang muncul akibat dari kemiskinan merupakan efek eksponensial terhadap tatanan sosial secara keseluruhan.

Kompleksitas masalah kemiskinan memerlukan cara penanganan yang komprehensif dan mencakup unsur kehidupan rakyat dan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Banyaknya pandangan dan anggapan yang hampir sama mengungkapkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan. Namun jika digali lebih dalam lagi, ternyata ada faktor lain yang menyebabkan program pengentasan kemiskinan.

Program pengentasan kemiskinan di banyak negara dilakukan dan tersusun secara berbeda-beda melalui serangkaian program yang dapat meningkatkan ataupun tidak dalam kesejahteraan masyarakat. Program pengentasan kemiskinan saat ini yang terdapat di Indonesia sebenarnya tidak dapat menjamin mengentaskan kemiskinan. Hal ini terlihat dari keterangan Kepala BPS yaitu Margo Yuwono bahwa persentase kemiskinan sampai September 2021 sebesar 9,71%.

Terkait percepatan penanggulangan kemiskinan, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010-sekarang diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 96

Tahun 2015-menyatakan bahwa merupakan strategi dan program pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terencana, runtut, kolaboratif dengan dunia usaha dan masyarakat. Dengan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, jumlah penduduk miskin dapat dikurangi. Program Keluarga Harapan (PKH) yang pro masyarakat miskin merupakan salah satu cara pemerintah untuk memerangi kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, mengatur secara khusus tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Basis Data Terpadu (BDT) yang dijalankan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kessos) Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Program *Conditional Cash Transfer* (CCT) adalah nama yang diberikan untuk itu dalam skala global. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 10 Tahun 2017.

Bantuan sosial yang dibagikan kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi modal awal usaha, yang kemudian penghasilan dari usaha tersebut bisa untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan masa berlakunya dalam waktu lama, sehingga angka kemiskinan menurun. Program ini dilakukan oleh perwakilan organisasi pemerintah yang bergulir di bidang sosial adalah Dinas Sosial.

Dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dicairkan sebanyak empat kali dalam setahun. Ada beberapa minimal kriteria tersendiri yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan PKH adalah Para Ibu hamil, Ibu yang mempunyai anak balita sampai tujuh tahun, kemudian anak SD, SMP, dan SMA,

serta para lanjut usia. Menurut Permensos No 1 Tahun 2018 dalam pembagian uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat permasalahan adalah target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tepat.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 26 Tahun 2021 mengatur tentang pemberian bantuan jaminan sosial Permakanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Pekalongan. Kriteria penerima bantuan dalam peraturan ini sama halnya dengan kriteria yang diberikan untuk penerima PKH.

Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) telah menyebabkan muncul adanya akuntabilitas dan transparansi yang akan menjadi bahan keterangan esensial untuk masyarakat. Karena akuntabilitas mengarahkan pada integritas dan ketetapan dalam perwujudan program serta mengarahkan pada kejayaan dalam pencapaian program yang telah dilakukan. Dan transparansi adalah salah satu proses keterbukaan bagi pengelola manajemen khususnya manajemen publik untuk menciptakan aksesibilitas dalam proses pengelolaan supaya arus informasi masuk dan keluar saling seimbang, sehingga proses transparansi tidak sekadar disediakan oleh publik pengelola akan tetapi rakyat juga berhak mendapatkan informasi yang bersangkutan dengan kepentingan publik.

Terdapat kasus aduan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dimuat di artikel berita, termasuk salah satunya dari *Detik Jateng* di mana ibu-ibu yang mengidentifikasi sebagai masyarakat Desa Rembun untuk Meningkatkan Standar Hidup memasang sejumlah spanduk protes. Salah satunya adalah “*Lebih baik saya pakai daster sobek, dari pada kami punya motor PCX, tapi dapat PKH*”. Dan perwakilan warga yang diketahui namanya Nur Faizah (55)

mengatakan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan salah sasaran dalam penyalurannya. Karena menurutnya banyak warga yang berada tapi memperoleh bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). (Robby Bernadi, 2022)

Selain itu juga ada kasus terkait Program Keluarga Harapan di Desa Ketitang Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang dimuat dalam artikel berita *INews.id* yang menyatakan bahwa terdapat puluhan rumah yang terawat bahkan mewah yang masih mendapat bantuan sebagai warga PKH dan bantuan pemerintah non tunai. Setiap bulan mereka selalu mendapatkan menerima bantuan paket sembako untuk masyarakat kurang mampu. Banyak warga terus memasang dan menolak untuk melepasnya dan mereka tidak peduli jika dianggap warga kurang mampu. Tetapi ada juga warga yang merasa bersalah dan ingin mencopotnya (Suryono Sukarno, 2020).

Dalam menjalankan suatu program, telah diwajibkan bagi instansi pemerintah untuk menginformasikan dan melaporkan semua kegiatan program yang sudah dikerjakan agar bisa mewujudkan instansi pemerintahan yang baik. Akuntabilitas dan transparansi adalah komponen penting dari tata pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan yang efektif, yang sangat penting untuk kesinambungan dan pertumbuhan program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Menurut perspektif akuntansi, akuntabilitas, dan transparansi adalah komponen kunci *good governance* yang efektif.

Penerapan akuntabilitas yang baik untuk mengelola dana program pemberantasan kemiskinan dilaksanakan oleh instansi pemerintah harus diawasi

serta dikelola secara maksimal untuk mencegah terjadinya permasalahan yang tidak terduga.

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab pelaksanaan dalam organisasi untuk meraih tujuan yang sudah diatur melalui pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara publik. Menurut Antonio Bar Cendon Akuntabilitas adalah tanggung jawab yang mengarah pada kewajiban umum pejabat publik untuk menginformasikan, menjelaskan dan/atau membenarkan lembaga dalam atau luar, untuk menyampaikan laporan tentang aktivitas mereka dan untuk dievaluasi ataupun peninjauan.

Transparansi merupakan prinsip yang akan mempermudah jalan atau memberi kelonggaran kepada semua penduduk untuk mendapatkan data mengenai pengendalian suatu program pemerintahan yaitu data mengenai wewenang, sistem dan juga hasil yang akan tercapai. Sementara itu, Dwiyanto mengatakan transparansi merupakan pengadaan sumber informasi mengenai instansi pemerintahan umum dan terjaminnya kemudahan mendapatkan data yang memadai dan tepat (Lalolo, 2003).

Akuntabilitas dan transparansi pemerintahan tidak hanya dipraktikkan di pemerintah pusat saja tetapi juga di tingkat daerah sampai wilayah desa, yang secara keseluruhan memerlukan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan aktivitas yang dilakukan. Tetapi, terkadang masih ada pihak individu yang terikat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang kurang memahami akuntansi pemerintah dengan baik khususnya di daerah pedesaan. Seiring berjalannya waktu, sekarang desa sudah mulai berkembang dalam berbagai

bentuk yang perlu diberdayakan agar desa menjadi desa yang kuat, mandiri, dan maju serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi, desa mempunyai kemampuan dan potensi masyarakat.

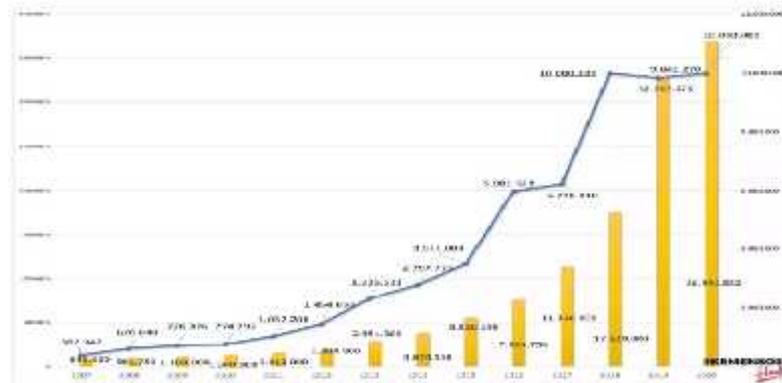
Hasil penelitian Syeni Rakhmandani mengatakan bahwa bantuan sosial di era digital belum cukup akuntabel karena penerima manfaat masih belum mendapatkan pelayanan terbaik, sosialisasi yang berhubungan dengan bansos juga belum diberikan melalui lembaga keuangan digital, keterbukaan informasi belum maksimal dan fasilitas yang tidak mencukupi.

Hasil penelitian dari Umaroh dan Sutjiatmi (2018) mengungkapkan bahwa kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilaksanakan sesuai dengan alur pelaksanaan PKH yang baik jika dilihat dari segi pelaksanaannya. Tetapi dalam pelaksanaan PKH seperti sasaran pemilihan rumah binaan, tata cara sosialisasi dan pembagian bantuan masih belum maksimal. Para peserta sangat berdedikasi untuk meningkatkan kehadiran baik di fasilitas pendidikan maupun kesehatan karena sadar akan potensi bahaya atau konsekuensinya.

Astari dan Pambudi melakukan penelitian yang hasilnya adalah upaya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurai kemiskinan di Kabupaten Pandak belum berhasil. Kendala tersebut antara lain minimnya pendanaan sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksana PKH, minimnya pendamping, belum adanya mekanisme atau aturan yang mewajibkan pelaporan penggunaan dana bantuan oleh peserta PKH, menurunnya kepatuhan peserta PKH, dan tidak

konsistennya pemutakhiran data base penerima PKH akibatnya bantuan PKH kurang sesuai sasaran.

Gambar 1.1 Grafik Data PKH Tahun 2007 – 2009



Fakta bahwa jumlah penerima PKH yang meningkat setiap tahun menunjukkan betapa besarnya jumlah penerima PKH di Indonesia. Namun seperti terlihat pada grafik Kemensos di atas, terjadi penyusutan jumlah penerima PKH pada tahun 2019, meskipun alokasi anggaran yang sangat besar meningkat 32,7 miliar, dan alokasi anggaran yang besar untuk 9,8 juta penerima PKH terus berlanjut menaikkan angka kemiskinan di tahun 2015.

Tabel 1.1 Rekap Data Penerima PKH Desa Duwet

| <b>JUMLAH KPM PKH DUWET<br/>TAHUN 2019 -2022</b> |              |          |          |          |
|--|--------------|----------|----------|----------|
| <b>TAHUN</b>                                     | <b>TAHAP</b> |          |          |          |
|  | <b>1</b>     | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> |
| 2019   | 86           | 86       | 86       | 81       |
| 2020   | 81           | 84       | 82       | 105      |
| 2021   | 99           | 111      | 100      | 93       |
| 2022   | 120          | 117      | 117      | 116      |

Sumber: diolah oleh Pendamping PKH

Peningkatan jumlah penerima PKH dari tahun ke tahun juga terjadi di Desa Duwet. Bisa dilihat melalui tabel di atas bahwa setiap tahunnya selalu meningkat. Yang awalnya tahun 2019 hanya berjumlah 86 sekarang di tahun 2022 meningkat pesat menjadi 120 penerima PKH.

Dari informasi yang telah diberikan oleh Bapak Birin selaku Tenaga Administrasi Desa, data masyarakat Desa Duwet yang masuk dalam DTKS sebanyak 2.053 orang atau 720 KK dan yang mendapatkan bantuan PKH hanya 120 penerima PKH itu artinya hanya 16,7%. Dari data keseluruhan tersebut diperkirakan ada sekitar 20% penerima PKH yang kurang tepat sasaran. Penyebab salah satu dari kurang tepat sasaran yaitu penerima PKH yang belum memperbaharui Kartu Keluarga, data dapodik tidak terindikasi sistem dan itu bisa menghambat dalam penyaluran dana bantuan PKH yang tepat sasaran. Artinya, PKH perlu lebih akuntabel dan transparan untuk memastikan program ini dilaksanakan secara efektif.

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah informasi yang diberikan di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan studi lebih lanjut mengenai akuntabilitas dan transparansi dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Penerima PKH di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Akuntabilitas Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menjelaskan Akuntabilitas Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan
2. Untuk Menjelaskan Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dalam kebijakan publik dan memperluas ilmu pengetahuan baik itu teori maupun praktik akuntansi dalam instansi pemerintah

2. Bagi Pemerintah Desa

- a. Melalui hasil penelitian ini penulis berharap bisa membantu menyampaikan informasi kepada pemerintah bahwa penyelenggaraan sudah sesuai dengan menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam

menjalankan pembagian uang bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

- b. Hasil penelitian ini juga dinantikan dapat menjadi referensi untuk pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam menjalankan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

### 3. Bagi Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini penulis berharap bisa menjadi sumber data mengenai bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

## **E. Sistematika Pembahasan**

Tahapan yang harus dilakukan dalam menyusun penelitian ini yaitu dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab pertama pada penelitian ini adalah pendahuluan, yang didalamnya menjabarkan mengenai latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, dan yang terakhir ada tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II                    LANDASAN TEORI**

Bab kedua pada penelitian ini adalah landasan teori, yang didalamnya membahas mengenai teori apa yang digunakan pada penelitian ini dan materi pendukung lainnya. Selain itu,

juga berisi penelitian terdahulu dari beberapa penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian yang akan diuji.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga pada penelitian ini adalah metode penelitian, yang didalamnya menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan metode analisis data.

### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab keempat pada penelitian ini adalah analisis data dan pembahasan, yang didalamnya mengandung mengenai deskripsi umum lokasi penelitian, hasil pembahasan yang diperoleh dari hasil observasi dan juga wawancara kepada Sekretaris Desa, Tenaga Administrasi Desa, dan 5 Penerima PKH Desa Duwet yang sudah dikelola sesuai dengan teknik yang digunakan pada penelitian ini.

### BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini adalah penutup, yang memuat ringkasan dari seluruh hasil penelitian yang sudah dilakukan, serta kekurangan dalam penelitian ini dan juga saran untuk peneliti selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan analisis data dan pembahasan melalui wawancara dan observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Duwet sudah dilaksanakan secara akuntabilitas dan masuk dalam kategori akuntabilitas yang kuat. Hal itu bisa dilihat dari penyelenggaraan PKH yang sudah berjalan sesuai dengan peraturan hukum pemerintah dan buku pedoman pelaksanaan PKH Tahun 2021-2024. Laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada wewenang administrasi dan otoritas politik. Kemudian ada beberapa penerima PKH yang kurang tepat sasaran karena dalam pemutakhiran data ada beberapa yang belum diupdate. Pencairan dana bantuan dilakukan langsung oleh masing-masing penerima PKH melalui KKS dan jumlah nominal yang diperoleh sesuai dengan kategori yang dimiliki. Pelaksanaan PKH Desa Duwet terhindar dari kecurangan pemotongan iuran apapun. Pendamping PKH juga melakukan tugasnya dengan baik.
2. Berdasarkan analisis data dan pembahasan melalui wawancara dan observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Duwet sudah dilaksanakan secara transparansi. Hal itu bisa dilihat dari penyelenggaraan PKH yang sudah berjalan sesuai dengan peraturan hukum pemerintah dan buku pedoman pelaksanaan PKH Tahun 2021-2024. Tetapi ada juga yang tidak

sesuai dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 mengenai PKH dan Buku Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial PKH Tahun 2021 karena adanya keterlambatan dalam penyaluran dana bantuan PKH. Penerima PKH Desa Duwet mendapatkan pelayanan publik dengan fasilitas sesuai peraturan pemerintah. Namun media publik atau *website* Desa Duwet belum dikelola dengan baik dan informasi yang disediakan belum terlalu lengkap. Masyarakat hanya bisa mengakses website yang disediakan oleh pemerintah seperti [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id).

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan sesuai dengan panduan, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih ada keterbatasan sebagai berikut:

1. Kurangnya informan utama yaitu Kepala Dinas Sosial susah untuk ditemui karena mempunyai kesibukan yang tidak bisa diganggu.
2. Tidak bisa melampirkan laporan realisasi keuangan dalam skripsi ini karena laporan tersebut bersifat rahasia dan tidak boleh diperlihatkan secara publik.
3. Tidak bisa melampirkan struk bukti pencairan dana PKH dikarenakan pada bulan Desember penerima PKH tidak menarik langsung dana tersebut lewat ATM melainkan pengambilan dana dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Pos lewat surat pemberitahuan.

### **C. Implikasi**

#### 1. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Duwet.

#### 2. Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan partisipasi bagi pemerintah dan bisa menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk menerapkan alur pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan peraturan hukum dari pemerintah karena itu merupakan hal penting dalam akuntabilitas dan transparansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alawiyyah, S., Unti, L., & Aji, D. M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bergulir UPK-G. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 6(2), 130–141.
- Astutik, A. W. (2018). Fenomenologi Akuntansi Rumah Tangga (Studi Kasus pada Keluarga TNI-AD Kota Malang). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Azizah, R. (2018). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Pada Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pagelaran). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Bastian, I. (2005). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (2015). *Kajian Program Keluarga Harapan*.
- Dixon, R., Ritchie, J., & Siwale, J. (2006). Microfinance: Accountability From The Grassroots. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 19(3), 405–427. <https://doi.org/10.1108/09513570610670352>
- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Farida, U. dan S. S. (2018). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. *Governmental Studies*.
- Gwijangge, N., Jati, I. K., Putri, I. G. A. M. A. D., & Wirawati, N. G. P. (2021). Akuntabilitas, Transparansi Pemerintah Desa dan Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 1549–1560.
- Halim, A., & Muhammad, I. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hoesada, J. (2019). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

- Kuswarno, E. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi: Konsep, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Lalolo, L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: BAPPENAS.
- Leksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mais, R. G., & Lini, P. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57–66.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Najidah, N. dan L. H. (n.d.). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)* 3(2), 92–107.
- Permensos. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*.
- Rahmawati, F. (2020). Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. *Skripsi*. Institusi Agama Islam Negeri Surakarta.
- Rakhmadani, S. (n.d.). Akuntabilitas Pelayanan Publik: Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Era Digital. *Stisipol Dharma Wacana Metro*, 97–112.
- Rismayadi, D. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 8–14.
- Robby Bernadi. (2022). *Emak-Emak Pekalongan Demo Gegara Tak Dapat Bansos Selama Pandemi*. Detik Jateng. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-5911849/emak-emak-pekalongan--demo-gegara-tak-dapat-bansos-selama-pandemi>

- Rohmah, Y. A. (2015). Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Semampir Surabaya). *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 18 (September 2014), 1–9.
- Sayuti, Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *ATESTASI Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28.
- Sudrajat, A. R. (2021). Pengaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 395–402.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Surjadi. (2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Sutjiatmi, S., & Umaroh, F. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhuri Kabupaten Tegal. *Indonesian Governance Journal*, 2(2).
- Suyono Sukarno. (2020). *Rumah Mewah Terima Bantuan PKH di Pekalongan, Pemilik: Saya Rasanya Malu*. INews.Id. <https://jateng-inews.id/berita/rumah-mewah-terima-bantuan-pkh-di-pekalongan-pemilik-saya-rasanya-malu>
- Tama, P. S. A., & Dewa, G. W. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 73–87.
- Tri, A. U. dan A. P. (n.d.). Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pandak Bantul. *FIS UNY*.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik: Konsep Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Cetakan 1). Bandung: Mandar Maju.
- Yandra, A., Setiawan, H., Sella, N., Prihati, P., & Derin, T. (2020). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru*. 19(2), 168–176. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.119>
- Yusra, M., & Riyaldi, M. H. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 1–15.